LAPORAN KINERJA 2019

PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGANTAR

KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Ade Palguna

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM (Pusrenbang SDM) Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusrenbang SDM selama tahun 2019. Penyusunan LKj ini sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pusrenbang SDM Tahun 2019, memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, tugas pokok, fungsi dan organisasi;
2. Perencanaan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja.
3. Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Anggaran.
4. Penutup.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pusrenbang SDM telah berkinerja secara optimal dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 105,74%. Capaian tersebut didukung dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.934.059.310,00 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.937.664.000,00

Akhirnya, kami mengucapkan puji syukur atas capaian kinerja dan terimakasih atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Pusrenbang SDM Tahun 2019 ini. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Pusat,

Ade Palguna
NIP. 19650924 199303 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM merupakan salah satu Unit Eselon II Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) yang mempunyai tugas dalam Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 s/d 2019, Kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM mempunyai sasaran kegiatan "**Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kompeten**", yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pusrenbang SDM Tahun 2019 menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. **Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengelola KPH, 197 orang**
2. **Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya 1.300 orang**

Adapun capaian kinerja Pusrenbang SDM Tahun 2019 terhadap pencapaian 2 (dua) IKK sebesar 105,74 % dengan dukungan realisasi anggaran sebesar 99,98% dari pagu anggaran. Pengukuran efisiensi capaian kinerja terhadap penggunaan anggaran tahun 2019 mencapai 1,08 % yang berarti Pusrenbang SDM telah berkinerja lebih efektif. Sedangkan untuk efektifitas capaian kinerja sebesar 1,06% yang berarti penggunaan anggaran Pusrenbang SDM telah optimal dalam pencapaian target.

CAPAIAN DALAM ANGKA 2019

105,74 %

CAPAIAN KINERJA PUSRENBANG SDM

99,98 %

REALISASI ANGGARAN PUSRENBANG SDM

EFISIEN

100 % Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, **197 Orang**

106,62 % Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, **1.386 Orang**

Capaian kinerja Pusrenbang SDM selama 5 tahun periode Renstra 2015-2019 sebesar 27,86 % dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena output kinerja yang direncanakan pada Renstra tidak didukung pengalokasian anggaran yang diterima selama 5 tahun pelaksanaan Renstra dan adanya kebijakan pemerintah PP.49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan SE.1/Menlhk/SETJEN/PEG.0/1/2019 tentang larangan pengangkatan pegawai non PNS dan/ atau non P3K yang berdampak pada pelaksanaan rekruitmen Bakti Rimbawan Tahun 2019. Dengan kondisi tersebut, Pusrenbang SDM berusaha mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dan optimalisasi penggunaan tenaga bakti rimbawan yang direkruit tahun sebelumnya untuk pencapaian target dan sesuai dengan IKK Pusrenbang SDM.

CAPAIAN KINERJA PUSRENBANG SDM S/D 2019

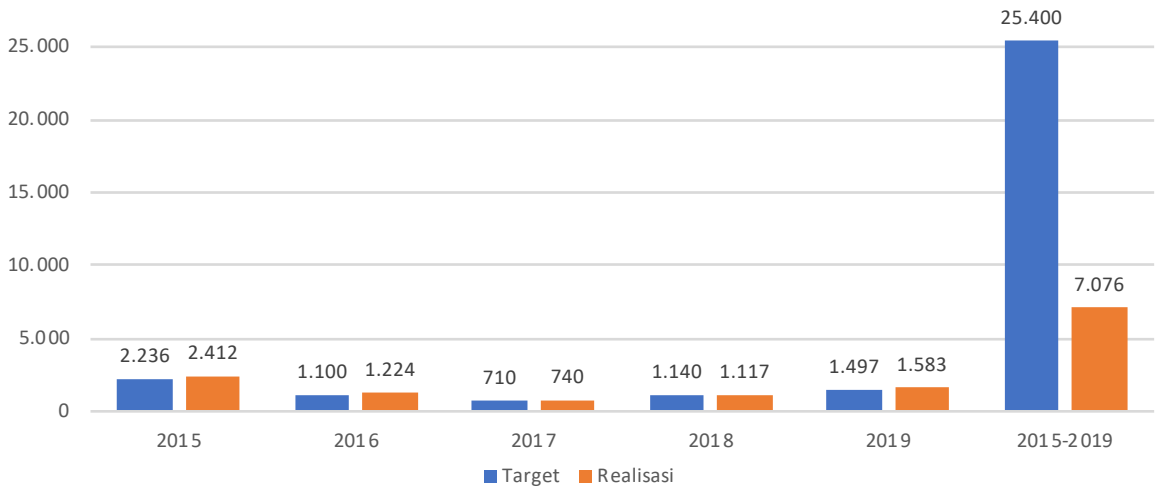

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
PERENCANAAN KINERJA	5
AKUNTABILITAS KINERJA	10
PENUTUP	25

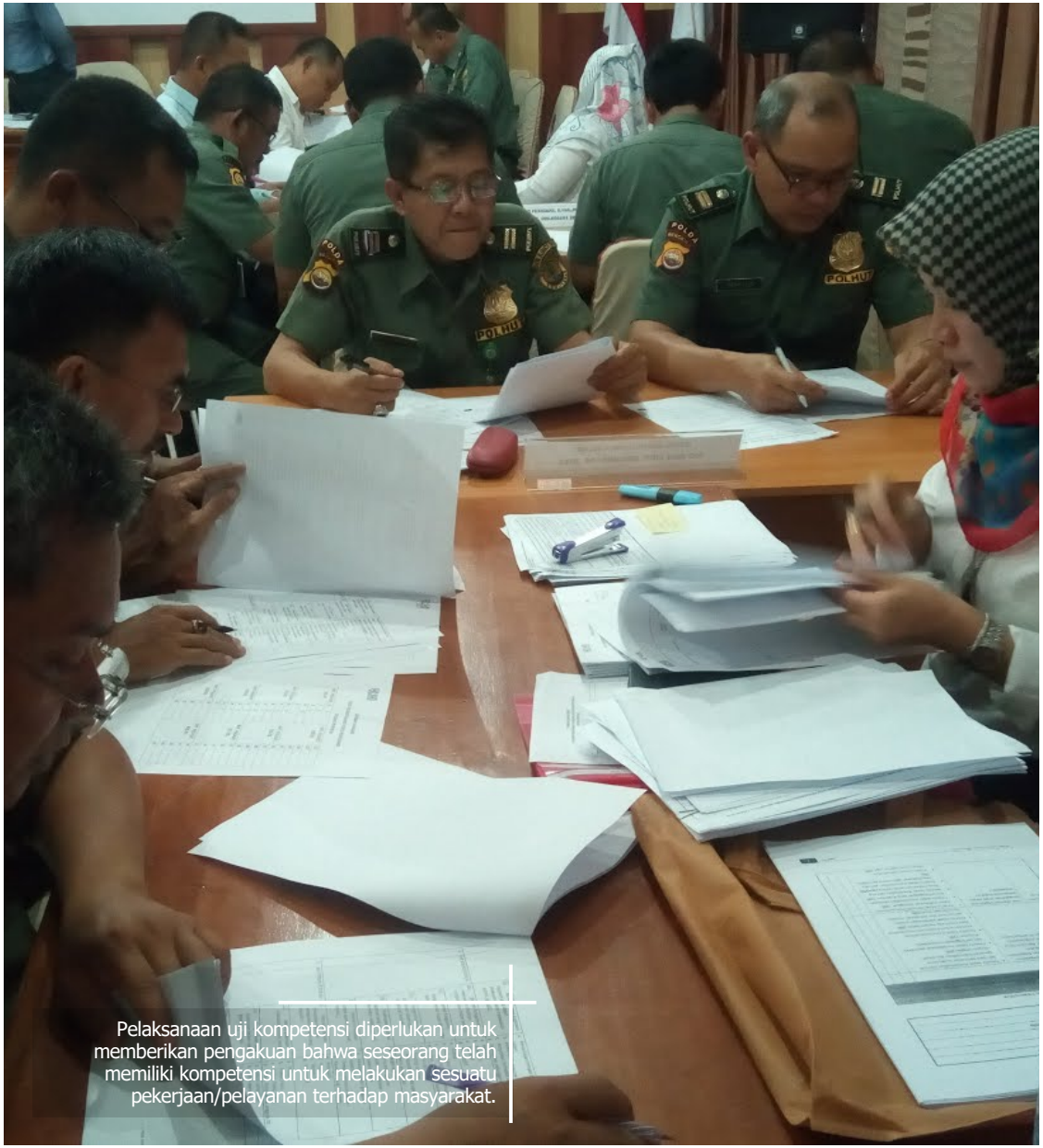

Pelaksanaan uji kompetensi diperlukan untuk memberikan pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melakukan sesuatu pekerjaan/pelayanan terhadap masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Eksistensi dan keberhasilan suatu organisasi didukung oleh keberadaan sumber daya manusia sebagai pelaksana pekerjaan. sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung dan penentu berjalannya tugas pokok dan fungsi organisasi. Peranan sumber daya manusia adalah partner strategis organisasi yang berarti bahwa semua lini operasi organisasi tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dalam mewujudkan eksistensinya untuk mencapai tujuan, suatu organisasi memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif guna menjamin tersedianya sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusrenbang SDM mempunyai tugas dalam Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan *good governance*, Pusrenbang SDM menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Pusrenbang SDM Tahun 2019 dan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan/reviu perencanaan pada waktu yang akan datang.

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Kinerja Pusrenbang SDM diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran program di Badan P2SDM sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No P.18/menlhk-II/2015

TUGAS

melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan

FUNGSI

- Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyrakat lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan
- Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standard kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- Pelaksanaan administrasi pusat

ORGANISASI

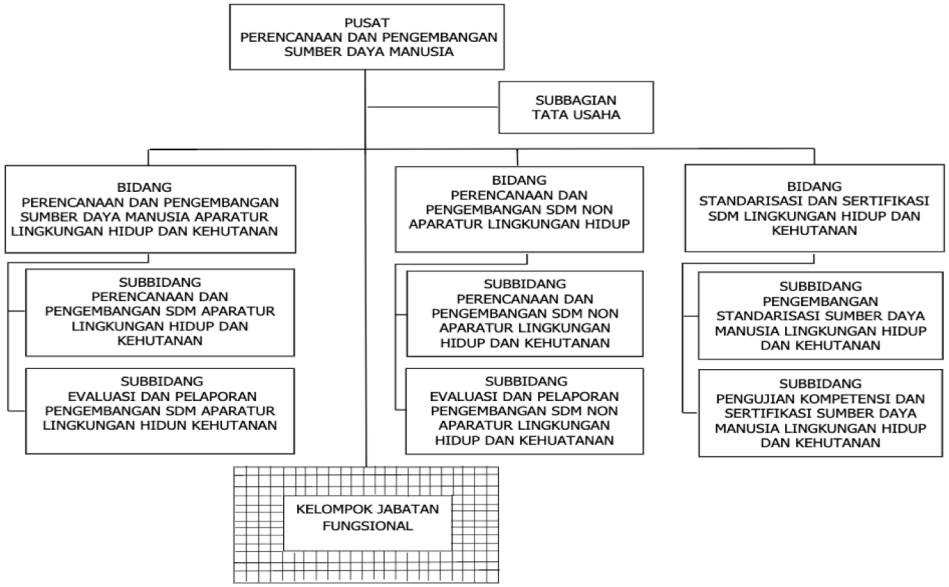

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai 44 orang terdiri dari :
29 orang PNS dan
15 orang tenaga kontrak

Eselon II		1 Orang
Eselon III		3 Orang
Eselon IV		7 Orang
Staf		33 Orang

Pemenuhan SDM pengelola KPH melalui program bakti rimbawan dalam mendukung operasionalisasi KPH

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PUSRENBANG SDM 2015 S/D 2019

Pusrenbang SDM mendukung program Badan P2SDM Melalui kegiatan "**Perencanaan Pengembangan SDM**" dengan sasaran kinerja program "**Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten sebanyak 25.400 Orang**".

Kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenihi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 Orang
2. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 Orang

TARGET RENSTRA PUSRENBANG SDM 2015 S/D 2019

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenihi kebutuhan tenaga pengelola KPH	**1.236 Orang**	**600 Orang**	**4.390 Orang**	**4.390 Orang**	**4.384 Orang**
2	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	**1.000 Orang**	**500 Orang**	**3.000 Orang**	**3.000 Orang**	**2.900 Orang**

RENCANA KERJA PUSRENBANG SDM

TARGET IKK TAHUN 2019

Rencana Kerja Pusrenbang SDM Tahun 2019 merupakan kerangka kerja dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2019. Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja, telah ditetapkan target yang akan dicapai pada Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenihi kebutuhan tenaga pengelola KPH
   197 Orang

2. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya
   1.300 orang

Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan kegiatan "**Perencanaan Pengembangan SDM**", pada Tahun 2019 Pusrenbang SDM didukung alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 15.205.194.000,00 Dalam perjalanannya, pagu anggaran APBN tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 17.937.664.000,00 karena adanya tambahan insentif anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 2.832.470.000,- dan pengurangan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai.

Tenaga Bakti Rimbawan membantu masyarakat sekitar KPH DI Yogyakarta dalam pemanenan Kayu Putih

INDIKATOR KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN PUSRENBANG SDM TAHUN 2019

INDIKATOR KEGIATAN	ELEMEN KEGIATAN
Terpenuhinya Tenaga Bakti Rimbawan sebagai Tenaga Pengelola KPH	**1. Perencanaan Bidang SDM Non Aparatur (4 Laporan)** **2. Perencanaan Bidang SDM Aparatur (3 Laporan)**
Terwujudnya SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	**1. Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK pendukung KPH (1.300 Orang)** **2. Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK (2 Laporan)**
Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaporan	**1. Penyusunan dokumen rencana program dan anggaran (3 Dokumen)** **2. Evaluasi dan Pelaporan (1 Laporan)** **3. SPIP Lingkup Pusrenbang SDM (1 Laporan)** **4. Pembinaan Pegawai (1 Laporan)** **5. Operasional Kegiatan Perkantoran (1 Laporan)**
Layanan perkantoran	**1. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (12 Bulan)**

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Badan P2SDM dan Kepala Pusrenbang SDM ditandatangani pada Bulan Desember 2018. Dalam perjalannya, terdapat perubahan pada target yang tercantum pada PK tersebut akibat adanya penambahan anggaran insentif sehingga terjadi penambahan target pada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana Tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja 2015 - 2019	Target awal	Target Revisi
Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 Orang	228 Orang	197 Orang
	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 Orang	1.000 Orang	1.300 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pusrenbang SDM berkomitmen menjadikan nilai-nilai budaya kerja sebagai dasar bersikap dan bertingkah laku dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Capaian Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM. Pengukuran dilakukan menggunakan formula sebagai berikut:

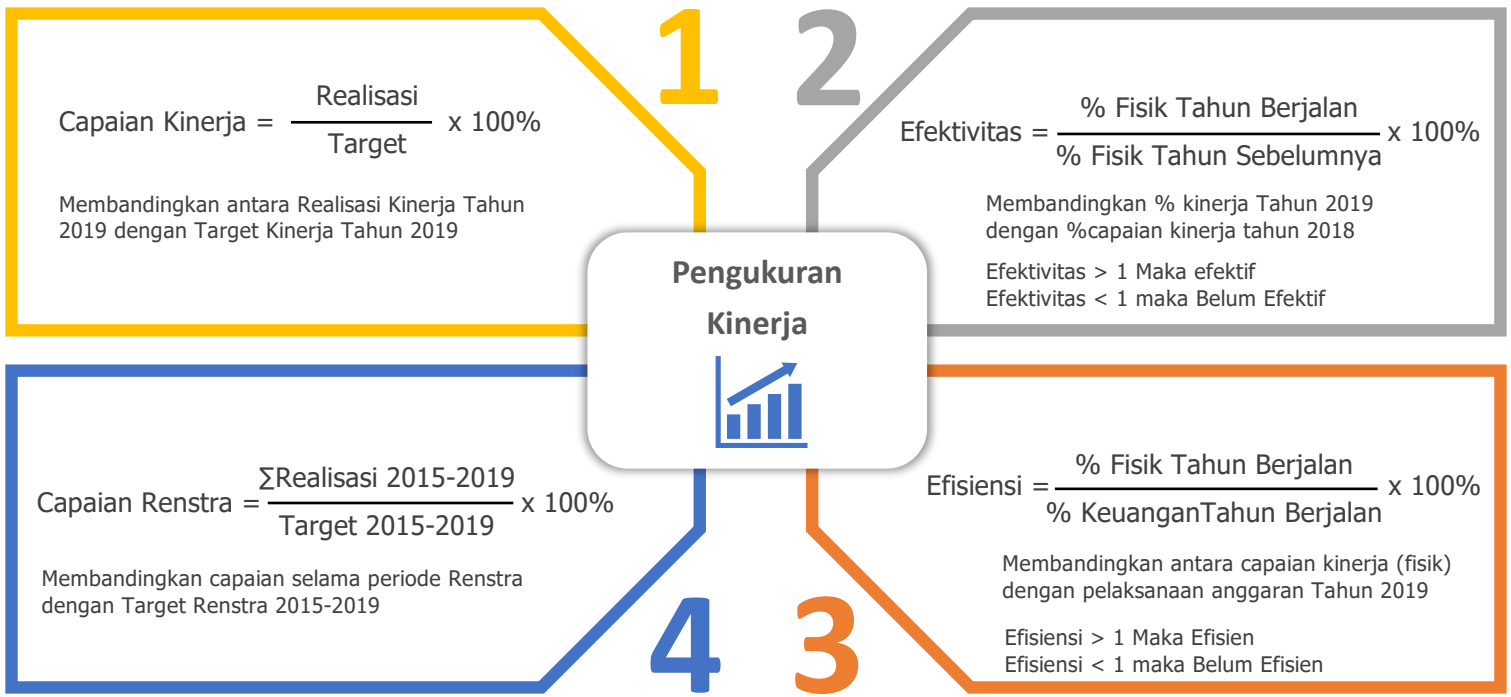

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian rencana dan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM tahun 2019.

CAPAIAN KINERJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
	Anggaran	Fisik	Anggaran	%	Fisik	%
Terpenuhinya tenaga bakti rimbawan sebagai tenaga pengelola KPH	12.505.194.000	197	12.503.613.069	99,99	197	100
Terwujudnya SDM LHK yang meningkat kompetensinya	5.432.470.000	1.300	5.430.446.241	99,96	1.386	106,62
JUMLAH	**17.937.664.000**	**1.497**	**17.934.059.310**	**99,98**	**1.583**	**105,74**

Berdasarkan table di atas, nilai capaian kinerja Pusrenbang SDM adalah 105,74%. Hal ini dapat dikatakan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja telah tercapai. Sebagai informasi PAGU awal anggaran Pusrenbang SDM sebesar Rp. 15.205.194.000, pagu anggaran APBN tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 17.937.664.000,00 karena adanya tambahan insentif anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 2.832.470.000,- dan pengurangan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai.

EFISIENSI CAPAIAN KINERJA

Efisiensi Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dilakukan melalui pembandingan antara capaian kinerja (fisik) Tahun 2019 dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2019. Dari hasil pembandingan tersebut dapat diketahui Efisiensi Capaian Kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2019. Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien, sedangkan bila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

EFISIENSI CAPAIAN KINERJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		% CAPAIAN		
		Kinerja	Keuangan	Efisiensi
5440.001	Terpenuhinya tenaga bakti rimbawan sebagai tenaga pengelola KPH	100	99,99	1,00
5440.002	Terwujudnya SDM LHK yang meningkat kompetensinya	106,62	99,96	1,07
Rata-rata		**105,74**	**99,98**	**1,06**

Berdasarkan Hasil perhitungan terhadap prosentase capaian kinerja dengan realisasi keuangan, Efisiensi capaian kinerja Pusrenbang SDM Tahun 2019 untuk rata-rata 2 IKK diperoleh nilai 1,06. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Pusrenbang SDM dalam mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan telah efisien.

EFEKTIFITAS CAPAIAN KINERJA

Rasio efektivitas capaian kinerja diukur dengan membandingkan persen capaian kinerja tahun berjalan dengan persen capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efektif, sedangkan bila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efektif.

EFEKTIFITAS CAPAIAN KINERJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		% CAPAIAN KINERJA		
		2018	2019	RASIO EFEKTIFITAS
5440.001	Terpenuhinya tenaga bakti rimbawan sebagai tenaga pengelola KPH	94,77	100,00	1,06
5440.002	Terwujudnya SDM LHK yang meningkat kompetensinya	100,00	106,62	1,066
RATA-RATA		**97,74**	**105,74**	**1,08**

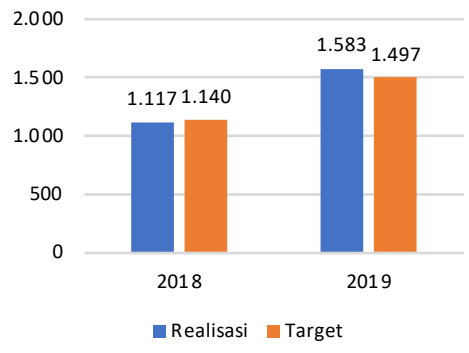

Secara umum capaian pada Tahun 2019 melebihi capaian Tahun 2018, hal ini ditunjukan dari nilai rata-rata efektivitas sebesar 1,08 yang berarti Pusrenbang SDM telah berkinerja lebih efektif. Nilai tersebut lebih besar dari 1 karena pada Tahun 2019 terdapat cost sharing antara Pusrenbang SDM dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan uji kompetensi.

CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENSTRA 2015 S/D 2019

Tahun 2019 adalah tahun akhir Renstra 2015 - 2019. Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 menjadi penentu tercapai tidaknya target Renstra Pusrenbang SDM 2015 – 2019. Hasil perhitungan menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja Pusrenbang SDM selama 5 tahun dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar 27,86 %. Prosentase ini jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan target output kinerja tidak didukung oleh anggaran yang sesuai, dimana target ditetapkan dengan jumlah yang tetap setiap tahun namun pagu anggaran setiap tahun cenderung menurun.
2. Adanya kebijakan pemerintah PP.49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan SE.1/Menlhk/SETJEN/PEG.0/ 1/2019 tentang larangan pengangkatan pegawai non PNS dan/atau non P3K yang berdampak pada pelaksanaan rekrutmen Bakti Rimbawan Tahun 2019.

CAPAIAN KINERJA SELAMA 5 TAHUN TERHADAP RENSTRA PUSRENBANG

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RENSTRA	CAPAIAN					TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019	OUTPUT	%
Perencanaan dan Pengembangan SDM	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	15.000	1.340	600	210	417	197	2.764	18,43
	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	10.400	1.072	624	530	700	1.386	4.312	41,46
JUMLAH		**25.400**	**2.412**	**1.224**	**740**	**1.117**	**1.583**	**7.076**	**27,86**

IKK 1

JUMLAH TENAGA BAKTI RIMBAWAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TENAGA PENGELOLA KPH

Perencanaan kegiatan patroli partisipatif Bakti Rimbawan dan masyarakat di KPH Seram Bagian Timur

TENAGA BAKTI RIMBAWAN

Dalam mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak, KPH harus dikelola oleh SDM yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Dalam artian bahwa jumlah SDM di KPH proporsional dengan beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPH serta SDM pengelola KPH memiliki kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan, standar kinerja serta tujuan KPH. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa secara kuantitas, SDM KPH mempunyai jumlah yang cukup untuk mendukung operasionalisasi KPH, disebabkan adanya penggabungan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota menjadi Dinas Kehutanan Provinsi sehingga SDM Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota harus dilimpahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi. Namun masih kekurangan dari segi kualitas, dimana kapasitas SDM yang dimiliki juga masih kurang, dikarenakan program pengembangaan selama ini belum mampu menjangkau seluruh SDM KPH yang ada.

Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM menyelenggarakan program Bakti Rimbawan.

Tahun 2019, alokasi anggaran penyelenggaraan bakti rimbawan pada awalnya untuk 228 orang, namun dengan berjalannya waktu, terdapat tenaga Bakti Rimbawan yang mengundurkan diri dengan alasan diterima CPNS, diterima BUMN, dan mengundurkan diri dengan alasan pribadi menjadi 197 orang. Sehingga pada bulan Oktober 2019 terjadi perubahan/revisi target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Badan P2SDM dengan Kepala Pusrenbang SDM. Rincian penempatan tenaga bakti rimbawan berdasarkan jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut:

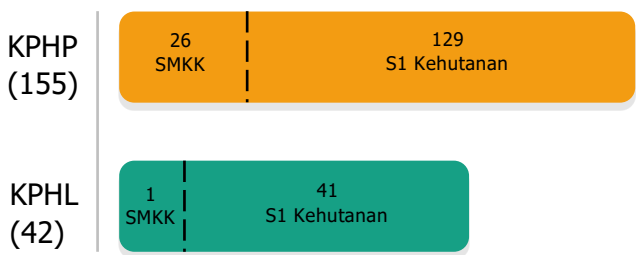

SEBARAN TENAGA BAKTI RIMBAWAN

Saat ini terdapat total keseluruhan jumlah tenaga Bakti Rimbawan yang masih aktif sebanyak 1.536 orang (197 orang dibiayai oleh Badan P2SDM dan 1.339 dibiayai oleh instansi pengguna) yang tersebar di 133 KPHP, 11 KPHK, 77 KPHL, 3 KHDTK dan 6 BDLHK.

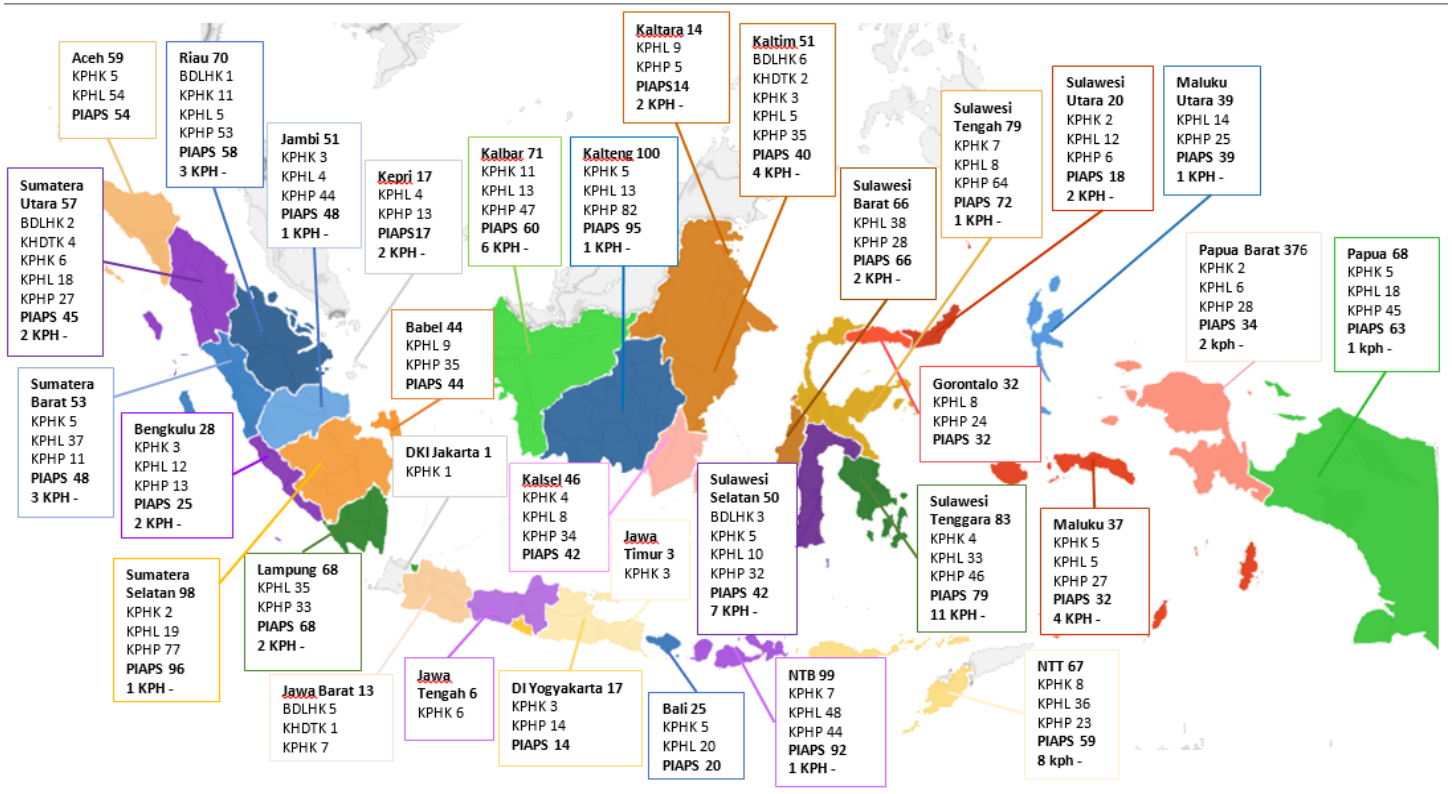

CAPAIAN RENSTRA IKK 1

Sesuai dengan Target tang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015 – 2019, jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH adalah 15.000 orang, namun realisasi hingga tahun 2019 sebanyak 2.764 orang atau 18,43 % dari target yang ditetapkan. Berikut rincian realisasi tenaga Bakti Rimbawan dari tahun 2015 s/d 2019.

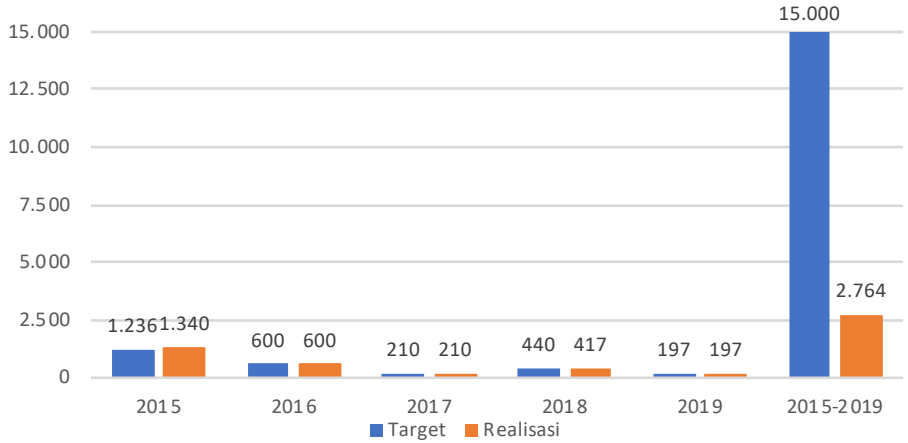

KENDALA

1) Target output kinerja/IKK pada renstra tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, sementara target pada renstra tidak dapat direvisi.
2) Adanya kebijakan pemerintah terkait larangan pengangkatan pegawai non PNS dan/atau non P3K yang berdampak pada pelaksanaan rekrutmen Bakti Rimbawan Tahun 2019.

TINDAK LANJUT

1) Penyusunan Rencana Kerja tahun berjalan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima.
2) Optimalisasi pendayagunakan tenaga Bakti Rimbawan yang sudah direkrut tahun sebelumnya

IKK 2

JUMLAH SDM LHK YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA

Pelaksanaan uji praktek penggunaan senjata oleh Polisi Kehutanan

UJI KOMPETENSI/SERTIFIKASI SDM LHK

Target awal kegiatan uji kompetensi sebanyak 1.000 orang, namun pada pertengahan tahun 2019 Badan P2SDM menerima insentif anggaran dari Kementerian Keuangan sehingga terdapat penambahan target uji kompetensi menjadi 1.300 orang. Adapun pelaksanaan uji kompetensi di 28 Provinsi (38 lokasi) dengan peserta uji sebanyak 1.422 orang dan hasil hasil uji sebagai berikut:

1.386 Orang Kompeten

36 Orang Belum Kompeten

Selain itu anggaran insentif juga digunakan untuk membentuk 5 Tempat Uji Kompetensi di 5 Balai Diklat LHK (Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, Bogor) dan perekrutan assesor sebanyak 89 orang.

Uji kompetensi menjadi salah satu persyaratan bagi PNS jabatan fungsional yang akan naik jenjang

Adapun rincian peserta uji kompetensi/Sertifikasi SDM LHK per jenis jabatan adalah sebagai berikut:

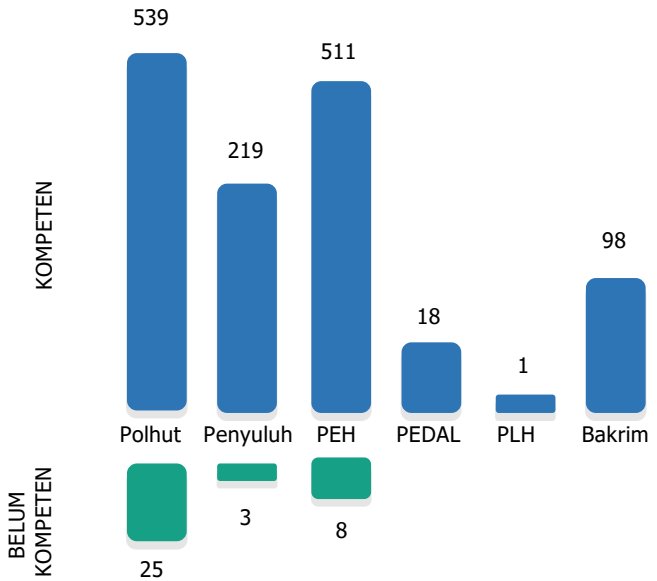

CAPAIAN RENSTRA IKK 2

Sesuai dengan Target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015 – 2019, jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya adalah 10.400 orang, namun realisasi hingga tahun 2019 sebanyak 4.312 orang atau 41,46 % dari target yang ditetapkan. Berikut rincian realisasi SDM LHK yang meningkat kompetensinya dari tahun 2015 s/d 2019.

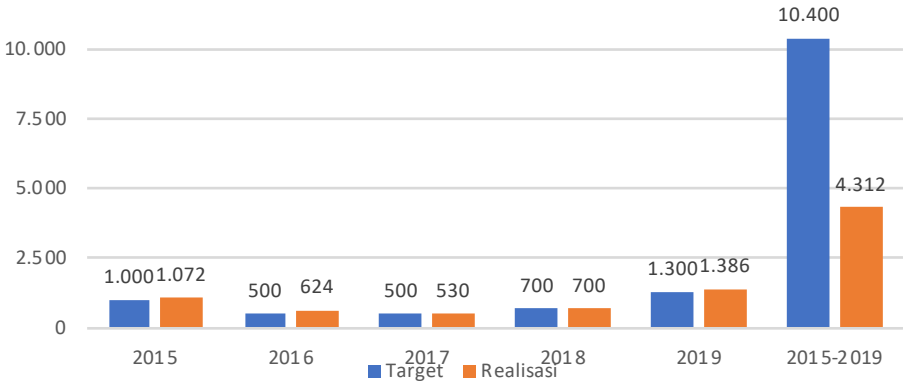

KENDALA

1) Target output kinerja/IKK pada renstra tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, sementara target pada renstra tidak dapat direvisi.
2) Belum tersedianya Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memadai untuk mendukung sertifikasi

TINDAK LANJUT

1) Penyusunan Rencana Kerja tahun berjalan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak/instansi yang terkait dalam pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pencapaian target kinerja.
2) Membentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) berbasis BDLHK di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, dan Bogor

REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Pusrenbang SDM pada tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp. 15.205.194.000,- yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Satuan Kerja Pusrenbang SDM sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400207/2019 tanggal 5 Desember 2018. Kemudian pada bulan Agustus, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 2.832.470.000,- yang merupakan tambahan anggaran insentif dari Kementerian Keuangan dan pada bulan Oktober terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai, sehingga anggaran Pusrenbang SDM pada akhir tahun 2019 sebesar RP. 17.937.664.000,-.

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2019, realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 mencapai Rp. 17.934.059.310,- atau 99,98% dari Pagu Anggaran yang tersedia. Adapun rincian anggaran per komponen adalah sebabagi berikut:

Kode	Komponen	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
5440.001	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	10.630.740.000	10.629.303.321	99,99 %
5440.002	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	5.432.470.000	5.430.446.241	99,96 %
5440.950	Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaporan	500.000.000	499.929.593	99,99 %
5440.994	Layanan perkantoran	1.374.464.000	1.374.380.155	99,99 %
JUMLAH		**17.937.664.000**	**17.934.059.310**	**99,98 %**

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

PERMASALAHAN

Selama tahun 2019 permasalahan yang sempat menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja dan realisasi anggaran antara lain:

1) Target output kinerja/IKK pada renstra tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, sementara target pada renstra tidak dapat direvisi.
2) Adanya kebijakan pemerintah PP.49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan SE.1/Menlhk/SETJEN/PEG.0/1/2019 tentang larangan pengangkatan pegawai non PNS dan/atau non P3K yang berdampak pada pelaksanaan rekrutmen Bakti Rimbawan Tahun 2019.

TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tindak lanjut yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Rencana Kerja tahun berjalan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima.
2) Peningkatan kerjasama antara Pusrenbang SDM dengan pihak-pihak/instansi yang terkait dalam pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pencapaian target kinerja.
3) Optimalisasi pendayagunakan tenaga Bakti Rimbawan yang sudah direkrut tahun sebelumnya

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pusrenbang SDM Tahun 2019 sebesar 105,74%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 97,74% sehingga menghasilkan nilai efektivitas sebesar 1,08 (efektif). Penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja tersebut sebesar 99,98% dari pagu anggaran sehingga nilai efisiensi sebesar 1,06 yang berarti Pusrenbang SDM telah optimal dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil pengkuran kinerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pusrenbang SDM dalam penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Badan P2SDM, laporan ini diharapkan dapat menggambarkan garis besar pelaksanaan kegiatan Pusrenbang SDM dalam rangka mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2019 seperti yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini dharapkan dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja antara Kepala pusrenbang SDM dengan Kepala Badan P2SDM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Ade Palguna**
Jabatan : **Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Helmi Basalamah, MM**
Jabatan : **Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Ir. Helmi Basalamah, MM	**Drs. Ade Palguna**
NIP. 19611119 198802 1 001	**NIP. 19650924 199303 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2015-2019	Target Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Tenaga Bakti Rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang	228 orang
		Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 10.400 orang	1.000 orang

Kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan SDM

Anggaran
Rp15.205.194.000,-

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Pihak Pertama,

Drs. Ade Palguna
NIP. 19650924 199303 1 001

Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja antara Kepala pusrenbang SDM dengan Kepala Badan P2SDM

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Ade Palguna**
Jabatan : **Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Helmi Basalamah, M.M.**
Jabatan : **Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ir. Helmi Basalamah, M.M.	**Drs. Ade Palguna**
NIP. 19611119 198802 1 001	**NIP. 19650924 199303 1 001**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2015-2019	Target Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Tenaga Bakti Rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang	197 Orang
		Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 10.400 orang	1.300 orang

Kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan SDM

Anggaran
Rp17.937.664.000,-

Jakarta, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Pihak Pertama,

Drs. Ade Palguna
NIP. 19650924 199303 1 001

Lampiran 3. Rincian Penempatan Tenaga Bakti Rimbawan

No	Provinsi	Unit Kerja	S1	SMK	Total
1	Bangka Belitung	KPHL Belantu Mendanau		3	3
2	Bangka Belitung	KPHL Unit XII Kab. Belitung Timur		2	2
3	Bangka Belitung	KPHP Sungai Sembulan	1	3	4
4	Jambi	KPH Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI, dan XVII	1	8	9
5	Jambi	KPHP Batanghari	1	4	5
6	Jambi	KPHP Muaro Jambi Unit XIII	1	4	5
7	Jambi	KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1	4	5
8	Kalimantan Barat	KPH Kubu Raya	1	4	5
9	Kalimantan Barat	KPH Mempawah	1	2	3
10	Kalimantan Barat	KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur		3	3
11	Kalimantan Barat	KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara		2	2
12	Kalimantan Barat	KPH Wilayah Ketapang Selatan	1	5	6
13	Kalimantan Barat	KPH Wilayah Melawi		3	3
14	Kalimantan Barat	KPH Wilayah Sintang Timur	1	4	5
15	Kalimantan Tengah	KPHP Barito Hilir		1	1
16	Kalimantan Tengah	KPHP Barito Tengah Unit VI Dan VIII	1	3	4
17	Kalimantan Tengah	KPHP Kahayan Tengah	1	4	5
18	Kalimantan Tengah	KPHP Kapuas Hulu Unit X	1	3	4
19	Kalimantan Tengah	KPHP Kapuas Tengah	1	3	4
20	Kalimantan Tengah	KPHP Katingan Hilir	1	3	4
21	Kalimantan Tengah	KPHP Katingan Hulu	1	3	4
22	Kalimantan Tengah	KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah Unit XIX Dan XX	1	4	5
23	Kalimantan Tengah	KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir	2	7	9
24	Kalimantan Tengah	KPHP Sukamara - Lamandau		6	6
25	Kepulauan Riau	KPHL Unit II Batam		4	4
26	Maluku	KPH Kab. Seram Bagian Timur	1	2	3
27	Maluku	KPH Seram Bagian Timur		3	3
28	Maluku Utara	KPH Halmahera Barat		3	3

No	Provinsi	Unit Kerja	S1	SMK	Total
29	Maluku Utara	KPH Halmahera Tengah		4	4
30	Maluku Utara	KPH Halmahera Utara		2	2
31	Maluku Utara	KPH Pulau Morotai	1	2	3
32	Maluku Utara	KPH Ternate-Tidore		2	2
33	NTB	BKPH Orong Telu Brang Beh	2	7	9
34	NTT	KPH Wilayah Kabupaten Kupang	1	4	5
35	Papua	KPHP Kota Jayapura unit XXVIII		1	1
36	Papua	KPHP Unit III Papua		2	2
37	Papua	KPHP UNIT XLIII		1	1
38	Papua	KPHP UNIT XXIII		5	5
39	Papua	KPHP UNIT XXVIII		4	4
40	Papua	NABIRE		1	1
41	Papua	UNIT LIII PAPUA		2	2
42	Papua	UNIT XLVIII PAPUA		2	2
43	Papua	UNIT XXXVIII PAPUA		5	5
44	Sulawesi Tengah	KPH Dampelas		3	3
45	Sulawesi Tengah	KPH Kulawi (KPHL Unit VIII)		2	2
46	Sulawesi Utara	KPHL UNIT III KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD, DAN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO		6	6
47	Sulawesi Utara	KPHP UNIT V MINAHASA, TOMOHON, MINAHASA TENGGARA, DAN MINAHASA SELATAN		2	2
48	Sumatera Selatan	KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji	2	5	7
49	Sumatera Selatan	KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura	1	3	4
50	Sumatera Selatan	KPH Wilayah VII Mekakau - Saka	1	4	5
51	Sumatera Selatan	KPHP Unit V Lempiung - Mesuji		1	1
	Total		**27**	**170**	**197**

Lampiran 4. Rincian Pelaksanaan Uji Kompetensi 2019

No	Provinsi	Polhut		Penyuluh		PEH		Pedal		PLH		Bakti Rimbawan		TOTAL	
		K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK
1	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Barat	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
3	Sumatera Selatan	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	31	0
4	Riau	31	1	2	0	44	4	0	0	0	0	17	0	94	5
5	Riau 2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
6	Jambi	22	0	4	0	14	0	0	0	0	0	0	0	40	0
7	Jambi 2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0
8	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lampung	41	1	5	0	27	0	0	0	0	0	0	0	73	1
10	Lampung 2	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	9
11	Lampung 3	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
12	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DKI Jakarta 1	24	0	2	1	81	2	0	0	0	0	0	0	107	3
14	DKI Jakarta 2	43	1	7	0	57	0	6	0	0	0	0	0	113	1
15	DKI Jakarta 3	31	0	13	1	50	2	12	0	1	0	0	0	107	3
16	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jawa Tengah 2	8	0	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	23	0
19	Jawa Tengah 3	0	0	50	0	6	0	0	0	0	0	0	0	56	0
20	D.I. Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0
21	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bali	23	1	9	0	34	0	0	0	0	0	16	0	82	1
23	NTT	7	2	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3
24	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0

No	Provinsi	Polhut		Penyuluh		PEH		Pedal		PLH		Bakti Rimbawan		TOTAL	
		K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK	K	BK
25	Kalimantan Barat	16	0	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	43	0
26	Kalimantan Timur	3	0	15	0	19	0	0	0	0	0	0	0	37	0
27	Kalimantan Utara	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	11	0
28	Kalimantan Selatan	17	1	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	1
29	Sulawesi Selatan	22	1	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	103	1
30	Sulawesi Selatan 2	30	0	21	0	3	0	0	0	0	0	10	0	64	0
31	Sulawesi Selatan 3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
32	Sulawesi Tengah (INPASSING)	36	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	7
33	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0
34	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0
35	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
36	Maluku	18	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	24	0
37	Papua	14	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	33	0
38	Papua Barat	11	1	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	37	1
39	Bangka Belitung	7	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	0
Jumlah Tahun 2019		**539**	**25**	**219**	**3**	**511**	**8**	**18**	**0**	**1**	**0**	**98**	**0**	**1386**	**36**